IMPLEMENTASI PENANGANAN PENGEMIS DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2023

Oleh : Dhifa Salmadina

Pembimbing: Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Peningkatan jumlah pengemis di Kota Pekanbaru tidak hanya berdampak pada ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam penegakan kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dirumuskan sebagai kebijakan dalam menangani permasalahan pengemis. Meskipun penanganan dalam peraturan ini telah diimplementasikan, kenyataannya jumlah pengemis di Kota Pekanbaru terus meningkat, terutama dalam tiga tahun terakhir, dengan peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Penanganan Pengemis di Kota Pekanbaru pada tahun 2023.

Dalam Penelitian ini teori yang digunakan yakni Teori Implementasi Kebijakan dari Gorge C. Edward III. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial, sebagai bagian dari pemerintahan yang bertanggung jawab atas penanganan pengemis berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial, belum mengimplementasikan kebijakan tersebut secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain penyampaian pesan kebijakan yang masih terbatas dan tidak menyeluruh, tidak adanya alokasi anggaran khusus untuk penanganan pengemis, belum adanya pemberian insentif kepada pelaksana kebijakan, serta adanya kesenjangan antara pelaksanaan kebijakan dan ketentuan yang tercantum dalam peraturan, sehingga banyak ketentuan dalam peraturan yang dianggap belum terealisasi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan Dinas Sosial dapat meningkatkan upaya dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah yang menjadi Kebijakan dalam Penanganan Pengemis agar lebih optimal serta sebagai implementor Dinas Sosial perlu melakukan koordinasi kepada pemerintah terkait tisi kebijakan yang tidak dapat diimplementasikan, hal tersebut dapat mencakup usulan perbaikan atau revisi terhadap peraturan.

Kata Kunci : Implementasi, Penanganan, Peraturan Daerah, Pengemis

ABSTRACT

The increase in the number of beggars in Pekanbaru City not only has an impact on public order and welfare, but also poses challenges in the enforcement of policies regulated by the government. Regional Regulation of Pekanbaru City No. 12/2008 on Social Order was formulated as a policy in dealing with the problem of begging. Although the handling in this regulation has been implemented, the reality is that the number of beggars in Pekanbaru City continues to increase, especially in the last three years, with a significant

increase occurring in 2023. Therefore, this research aims to find out how the Implementation of Handling Beggars in Pekanbaru City in 2023.

In this study, the theory used is the Theory of Policy Implementation from Gorge C. Edward III. The method used in this research uses a qualitative approach with descriptive research type. The data collection method in this study was carried out by interview and documentation.

The results showed that the Social Service Office, as part of the government responsible for handling beggars based on the Pekanbaru City Regional Regulation Number 12 of 2008 concerning Social Order, has not implemented the policy optimally. This is caused by several factors, including the delivery of policy messages that are still limited and not comprehensive, the absence of a special budget allocation for handling beggars, the absence of incentives for policy implementers, and the gap between policy implementation and the provisions listed in the regulation, so that many provisions in the regulation are considered unrealized. With this research, it is hoped that the Social Service can increase efforts in implementing Regional Regulations that become Policies in Handling Beggars to be more optimal and as an implementor the Social Service needs to coordinate with the government regarding policy provisions that cannot be implemented, this can include proposals for improvements or revisions to regulations.

Keywords : Implementation, Handling, Regional Regulations, Beggar

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Saat ini, keberadaan gelandangan dan pengemis merupakan salah satu permasalahan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek ketertiban dan kesejahteraan. Hal tersebut semakin diperburuk dengan terus meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis, khususnya di kota-kota besar di Indonesia.¹ Salah satunya Kota Pekanbaru yang berada di Provinsi Riau saat ini menjadi salah satu kota yang menjadi tumpuan harapan masyarakat dalam mencari penghasilan untuk menghidupi diri dan keluarga.² Namun, tidak semua orang dapat dengan mudah meraih harapan tersebut karena terbatasnya lapangan kerja, ketidakcocokan antara kemampuan kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan, serta tingginya persaingan.³ Ketidakmampuan mendapatkan pekerjaan yang layak mengakibatkan kurangnya pendapatan tetap, berpotensi menyebabkan kemiskinan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini dapat mendorong beberapa individu untuk mencari cara alternatif bertahan hidup, dengan bergelandang dan menjadi pengemis.

Keberadaan gelandangan dan pengemis tidak hanya menjadi permasalahan yang memengaruhi kehidupan masyarakat dengan menciptakan ketidaknyamanan dan mengganggu ketertiban, tetapi juga menimbulkan tantangan serius dalam penegakan peraturan dan kebijakan pemerintah. Dalam mengatasi hal ini,

Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru menetapkan suatu kebijakan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial. Berdasarkan peraturan tersebut, kewenangan dalam mengimplementasikan peraturan berada pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Dinas Sosial bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penanganan permasalahan sosial dimasyarakat, termasuk permasalahan pengemis. Bentuk penanganan pengemis terdiri atas usaha preventif, represif dan rehabilitatif. Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial tindakan pencegahan (preventif) meliputi adanya larangan serta prinsip-prinsip penanganan pengemis, usaha represif meliputi penertiban pengemis dan ketentuan pidana, usaha rehabilitasi sosial meliputi pembinaan dan pelayanan sosial bagi pengemis.

Jumlah pengemis berdasarkan data oleh Dinas Sosial terjadi peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023. Fenomena pengemis tidak hanya dipicu oleh masalah ekonomi, tetapi juga oleh persepsi bahwa mengemis adalah cara cepat menghasilkan uang tanpa memerlukan keahlian atau pendidikan. Selain itu, ada beberapa pihak memanfaatkan situasi ini dengan mengorganisir aktivitas mengemis untuk keuntungan pribadi, yang seringkali memperburuk kondisi pengemis. Hal ini menunjukkan bahwa masalah pengemis melibatkan dimensi sosial dan kriminal, bukan sekadar isu ekonomi. Selain mengganggu ketertiban sosial, beberapa pengemis juga terlibat dalam perilaku agresif yang meresahkan masyarakat. Berikut ini merupakan salah satu permasalahan yang terjadi, dimana terdapat pengemis yang meresahkan masyarakat dengan berperilaku agresif. Berdasarkan pemaparan fenomena di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Implementasi**

¹ Emilia Norsaimah, M Uhaib As'ad, and Beni Akhmad, "Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Pengemis Dan Pengamen Di Kota Banjarmasin," 2022.

² Runi Astari, "Implementasi Kebijakan Penertiban Pengemis Di Jakarta Timur" (Universitas Indonesia, 2012).

³ Norsaimah, Uhaib As'ad, and Akhmad, "Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Pengemis Dan Pengamen Di Kota Banjarmasin."

Penanganan Pengemis di Kota Pekanbaru Tahun 2023”.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Implementasi Penanganan Pengemis di Kota Pekanbaru Tahun 2023?

C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui Implementasi Penanganan Pengemis di Kota Pekanbaru Tahun 2023

Manfaat penelitian berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis

1) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi gambaran yang jelas terhadap Implementasi Penanganan Pengemis di Kota Pekanbaru Tahun 2023. Serta dapat menjadi bahan masukan dan koreksi yang mendukung terhadap pemerintah Kota Pekanbaru terutama oleh Dinas Sosial.

2) Manfaat Akademis

Hasil penelitian penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam penelitian lain, baik di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ataupun bidang ilmu lainnya. elanjutnya.

D. KERANGKA TEORI

Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Danial Mazmanian dan Paul A. Sabatier “ Implementasi kebijakan adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan ”.⁴Implementasi kebijakan dalam prinsipnya, adalah metode untuk memastikan bahwa suatu kebijakan mencapai tujuannya, tanpa kelebihan atau kekurangan. Implementasi kebijakan sebenarnya melibatkan lebih dari sekadar menterjemahkan keputusan politik menjadi prosedur rutin melalui saluran birokrasi. Lebih jauh, implementasi berkaitan dengan penanganan konflik,

⁴ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, ed. Dede; Caroline Paskarina Mariana, 1st ed. (Bandung: APII Bandung, 2006).

pengambilan keputusan, dan distribusi sumber daya, termasuk tentang siapa yang mendapatkan manfaat atau dampak dari suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan pada substansinya, merupakan metode yang efektif untuk menjalankan suatu kebijakan yang baik agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan.⁵ Dalam penelitian tentang implementasi kebijakan ada beberapa teori yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pembahasannya, salah satunya adalah teori George Edward III. Gorge C. Edwards III dalam bukunya yang berjudul “*Implementing Public Policy*” mengemukakan empat variable sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.⁶

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berfokus pada pengamatan yang digunakan untuk mendefinisikan suatu fenomena yang terjadi. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dapat menghasilkan kajian fenomena yang lebih komprehensif. Pembahasan ini dimulai dari jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, jenis dan sumber pada data, serta cara memperoleh data.

Jenis pada penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan rumusan

⁵ Yulianto Kadji, *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik (Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas)* (Gorontalo: UNG Press Gorontalo, 2015).

⁶ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, ed. Setiyono; Yuyut, Setyorini; Indro, Basuki Wahyudi, 12 (Revisi) (Malang: Media Nusa Creative, 2021).

masalah yang mengarahkan penelitian ini pada penggambaran secara menyeluruh, sistematis, faktual, dan mendalam mengenai fenomena yang akan diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menjawab secara rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari situasi keseluruhannya dengan berdasarkan teori-teori yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru khususnya pada Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Pekanbaru Kota.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini lebih menekankan pada data yang diperoleh langsung di lapangan ketika penelitian dilakukan. Data yang dikumpulkan secara langsung berdasarkan wawancara dengan beberapa informan yang merupakan pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja, masyarakat dan pengemis.

b. Data Sekunder

Data sekunder, dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru, serta materi-materi literatur lainnya yang relevan untuk memperoleh teori, konsep, melalui hasil penelitian, buku, skripsi, jurnal atau bahan yang terkait dengan masalah yang dieliti guna melengkapi data primer penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data, informasi, serta penjelasan dari pihak terkait dalam penanganan pengemis di Kota Pekanbaru.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bagian penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mencatat seluruh proses dan hasil penelitian secara sistematis. Dokumentasi mencakup berbagai bentuk catatan, laporan, dan bukti visual yang mendukung temuan penelitian.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penanganan Pengemis di Kota Pekanbaru Tahun 2023

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ketertiban di lingkungan masyarakat. Saat ini, keberadaan pengemis menjadi salah satu masalah yang mengganggu ketertiban di lingkungan masyarakat. Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial tidak hanya memaparkan tentang penanganan terhadap pengemis saja namun juga, tetapi juga menetapkan Dinas Sosial sebagai instansi yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaannya. Dinas Sosial menggunakan peraturan ini sebagai dasar kebijakan dalam setiap upaya penanganan pengemis. Penanganan tersebut mencakup usaha preventif, represif, dan rehabilitatif.

1. Komunikasi

Komunikasi terdiri atas Transmisi atau Peyampaian Pesan, kejelasan, dan Konsisten. Bentuk komunikasi dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi antar instansi yang terlibat dalam penanganan pengemis. Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat bertujuan agar masyarakat dapat memahami kebijakan secara jelas. Sedangkan koordinasi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang bertindak sebagai pelaksana utama kebijakan ini, menjalin kerja sama dengan instansi terkait dengan memainkan peran penting dalam mengoordinasikan

langkah-langkah strategis untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan penanganan pengemis.

2. Sumber Daya

Sumber daya tentunya menjadi faktor penting demi terselenggaranya implementasi kebijakan dengan baik, maka dari itu dibutuhkan sumber daya yang cukup dan tepat oleh pelaksana kebijakan. Sumber daya di sini dibedakan menjadi dua yaitu berupa sumber daya manusia (*staff*) dan non manusia (anggaran fasilitas).

Sumber daya manusia atau tenaga kerja pegawai memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Dalam usaha preventif dilaksanakan oleh Pegawai Dinas Sosial, usaha represif dilakukan oleh Dinas Sosial yang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan dalam usaha rehabilitatif saat ini masih dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Sumber daya non-manusia, seperti anggaran untuk fasilitas sarana dan prasarana, memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan penanganan pengemis. Anggaran ini diperoleh dari APBD.

3. Disposisi

Disposisi yang positif mencerminkan dukungan, komitmen, dan pemahaman yang mendalam mengenai tujuan dan strategi kebijakan, yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat mampu menjalankan tugas mereka secara efektif. Disposisi semacam ini tidak hanya menunjukkan bahwa kebijakan didukung secara penuh oleh semua pihak terkait, tetapi juga bahwa mereka memiliki kesadaran yang jelas tentang pentingnya kebijakan tersebut dan bagaimana penerapannya dapat membawa perubahan yang signifikan. Disposisi terdiri atas Dimensi Pengangkatan dan Dimensi Insentif.

4. Struktur Birokrasi

Dinas Sosial menetapkan *Standard Operational Procedure* (SOP) dan

fragmentasi dalam pelaksanaan usaha penanganan pengemis, baik usaha preventif, represif maupun rehabilitatif.

G. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Implementasi Penanganan Pengemis di Kota Pekanbaru, meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dapat diketahui bahwa implementasi penanganan ini belum berjalan secara optimal. Kendala dalam pengimplementasian penanganan ini dipengaruhi oleh; pertama komunikasi yang belum berjalan hal ini dapat dilihat dari indikator transmisi, kejelasan dan konsistensi yang belum efektif dilakukan dalam usaha preventif, represif dan rehabilitatif, sumber daya masih belum maksimal, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia, sedangkan variabel disposisi belum optimal dilakukan, hal belum adanya pemberian insentif kepada pelaksana kebijakan yang dapat menjadi salah satu alasan menurunnya kinerja pegawai, Serta struktur birokrasi yang sudah berjalan tapi belum optimal dilihat dari indikator SOP yang ada namun tidak dijalankan, dari indikator fragmentasi juga belum berjalan secara optimal.

H. SARAN

Dinas Sosial Kota Pekanbaru bersama Satuan Polisi Pamong Praja perlu meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam penanganan pengemis. Langkah ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi kesenjangan dalam pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi prosedur yang ada, serta memperbaiki mekanisme kerja untuk mencapai hasil yang optimal. Selain itu, Dinas Sosial perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah terkait kendala implementasi, khususnya pada prinsip-prinsip penanganan dan ketentuan pidana, dengan memberikan alasan yang jelas dan usulan revisi kebijakan agar

lebih sesuai dengan kondisi di lapangan. Di sisi lain, pelatihan dan penyuluhan tambahan juga perlu direkomendasikan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan semua pihak terkait, sehingga kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi penanganan pengemis di Kota Pekanbaru.

I. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus Subianto, *Kebijakan Publik*, 1st ed. (Surabaya: Briliant (PT Menuju Insan Cemerlang), 2020).
- Nasution, Abdul Fattah. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harva Creative.
- Pramono, Joko. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Edited by Sutoyo. Surakarta: UNISRI Press, 2020.
- S. Aminah dan Roikan. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, Pranadamedia Group: Jakarta
- Sobari, Wawan. 2023. *Template Penulisan Metode Penelitian*. Malang: Inara Publisher.
- Sedana, Gede. *Gelandangan Dan Pengemis (Upaya Alternatif Penanganannya)*. 1st ed. Malang: PT Rubeq Insan Dharma, 2024.
- Suharno. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Proses Dan Analisis Kebijakan)*. Edited by Nanjar Trimukti. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial)*. Edited by Aep Gunarsa. 5th ed. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Syarif, Safrilsyah, Firfaus M Yunus, and M Hum. 2013. *Metode Penelitian Sosial*. Banda Aceh: Ushuluddin Publishing.
- Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Edited by Dede; Caroline Paskarina Mariana. 1st ed. Bandung: APII Bandung, 2006.
- Tresiana, Novita; Noverman Duadji. *Implementasi Kebijakan Publik (Pentingnya Kapital Sosial Dan Koproduksi)*. Bandar Lampung: Seluh Media, 2021.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik)*. Edited by Fandy Hutari. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Edited by Setiyono; Yuyut, Setyorini; Indro, Basuki Wahyudi. 12 (Revisi). Malang: Media Nusa Creative, 2021.

Skripsi:

- Astari, Runi. "Implementasi Kebijakan Penertiban Pengemis Di Jakarta Timur." Universitas Indonesia, 2012.
- Jonathan Tribuwono, "Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makasar (Studi Kasus Pada Dinas Sosial)" (Universitas Hasanuddin, 2017).

Jurnal:

- Agustina Nst, Aulia. "Evaluasi Penanganan Pengemis Di Kota Medan (Study Kasus Dinas Sosial Kota Medan)." Universitas Medan Area, 2022.
- Alvionita, Wini. "Implementasi Program Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember

- (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Jember).” Jember, n.d.
- Bedasari, Hafzana, and Endang Tri Wahyuni. “Implementasi Kebijakan Program Dinas Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Karimun.” *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 6, no. 2 (October 20, 2020): 230–41. [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(2\).5973](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(2).5973).
- Damayanti, Welda. “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Demak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015.” *Journal of Politic and Government Studies* 6 (2017).
- Hidayah, Sri Endang. “Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.” *Jurnal Kebijakan Pemerintah*, 2020, 84–97.
- Kadji, Yulianto. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik (Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas)*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo, 2015.
- Malian, Sobirin. *Kebijakan Publik Dalam Negara Hukum*. Edited by Bang Joedin. 1st ed. Yogyakarta: Penerbit Kreasi Total Media, 2021.
- Muslim. “Penanggulangan Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Pekanbaru.” *Jurnal El-Riyasah*, 2013. <https://doi.org/10.24014/jel.v411.26>.
- Norsaimah, Emilia, M Uhaib As’ad, and Beni Akhmad. “Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Pengemis Dan Pengamen Di Kota Banjarmasin,” 2022.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru